

**KRITIK PEMAHAMAN DAN PRAKTIK POLIGAMI SYAR'I  
PADA LEMBAGA DAUROH POLIGAMI INDONESIA;  
Studi *Living Qur'an* terhadap Surat An-Nisa' Ayat 3**

**Skripsi**

Diajukan kepada  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)  
Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh:  
**ANISA AFIFAH**  
**NIM: E93215059**

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Anisa Afifah

NIM : E93215059

Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul **KRITIK PEMAHAMAN DAN PRAKTIK POLIGAMI SYAR'I PADA LEMBAGA DAUROH POLIGAMI INDONESIA; Studi *Living Qur'an* terhadap Surat An-Nisa' Ayat 3** yang ditulis oleh Anisa Afifah ini telah disetujui pada tanggal 16 Desember 2019.

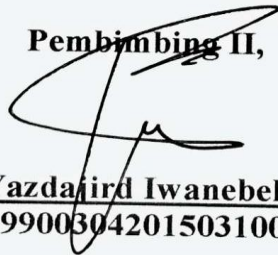
Surabaya, 16 Desember 2019

**Pembimbing I,**



**Drs. H. Fadjrul Hakam Chozin, MM**  
195907061982031005

**Pembimbing II,**



**Fejrian Yazdajird Iwanebel, M. Hum**  
199003042015031004





## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Anisa Afifah ini telah dipertahankan  
di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 20 Desember 2019

**Mengesahkan**  
**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**  
**Fakultas Ushuluddin dan Filsafat**

  
Dekan  
  
Dr. H. Kunawi, M.Ag  
NIP. 196409181992031002

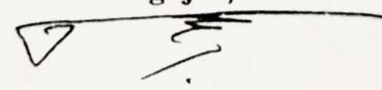
**Tim Penguji:**  
**Ketua,**

  
Drs. H. Fadjrul Hakam Chozin, MM  
NIP. 195907061982031005

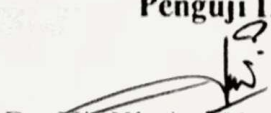
**Sekretaris,**

  
Dr. H. Abu Bakar, M.Ag  
NIP. 197304041993031006

**Penguji I,**

  
Dr. H. Abd Djalal, M.Ag  
NIP. 197009202009011003

**Penguji II,**

  
Dr. Hj. Khoirul Umami, M.Ag  
NIP. 197111021995032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANISA AFIFAH  
NIM : E93215059  
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ILMU ALQUR'AN DAN TAFSIR  
E-mail address : Afifahanisa1000@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

*Kritik Pemahaman dan Praktik Poligami Syar'i pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia;*  
*Studi Living Qur'an terhadap Surat An-Nisa' Ayat 3.*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Desember 2019

Penulis

(Anisa Afifah)  
nama terang dan tanda tangan





























































ini memaparkan, apabila hukum poligami dikaitkan dengan tiga pendapat di atas, kelompok yang dipimpin oleh Ja'far Umar Thalib terutama santri yang ada di pesantren Ihya' al-Sunnah cenderung pada pendapat pertama (setuju dengan poligami). Di sisi lain pula, kelompok ini juga mengkampanyekan dan menganjurkan kepada laki-laki untuk berpoligami. Mereka juga mengkritik para penulis dan liputan media massa yang bias karena hanya melaporkan sisi-sisi negatif dari poligami.

2. *Praktik Poligami Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Kota Malang*, Shava Oliviatie, Skripsi pada prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010. Skripsi ini menjelaskan bahwa dari hasil penelitiannya, aktivis Hizbut Tahrir Malang memandang hukum poligami adalah mubah atau boleh yang mengacu pada surat An-Nisa' ayat 3. Aktivis Hizbut Tahrir menganggap bahwa poligami merupakan sebuah solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dan kebolehnya boleh dilakukan tanpa syarat apapun. Sedangkan terkait dengan melakukan izin kepada pihak Pengadilan Agama terdapat dua pendapat; Pertama, izin ke Pengadilan Agama karena hal tersebut dirasa perlu sebagaimana yang telah diatur dalam KHI dan UU Perkawinan no. 1 tahun 1974. Kedua, dengan tanpa melakukan izin baik kepada istri maupun ke Pengadilan Agama karena proses perizinan yang seperti itu akan mempersempit ruang poligami. Sehingga akan menjadikan perzinahan dan perselingkuhan semakin merajalela.
3. *Pola Perkawinan Club Poligami Global Ikhwan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)*, Syafrinaldi dan Naimullah,



Jurnal Hukum Islam Vol. XV No. 1 pada prodi Hukum Islam, 2015. Jurnal ini memaparkan tentang penelitiannya terkait peristiwa munculnya Club Poligami Global Ikhwan yang berada di daerah Riau. Club ini merupakan satu-satunya club poligami yang ada di Indonesia pada waktu itu. Di Indonesia aliran ini berkembang pesat walaupun belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Mereka mengklaim memiliki anggota lebih dari 300 pasangan poligami. Pada dasarnya, club ini adalah club yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Namun dalam kenyataannya, club ini lebih cenderung sebagai aliran yang berusaha menjadikan poligami sebagai suatu keharusan. Ini terbukti dengan kegigihan mereka selalu mengajak kepada siapapun yang ditemuinya untuk mengikuti jejak mereka berpoligami.

Dalam ketiga penelitian di atas, terdapat kesamaan serta perbedaan dari ketiga telaah pustaka tersebut, sehingga tidak mengurangi orisinalitas pada penelitian ini. Adapun kesamaan penelitian ini dengan ketiga telaah pustaka di atas adalah pada tema bahasannya yakni sama-sama melegalkan poligami dalam syariat atau ajaran Islam. Adapun perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitian yakni lembaga Dauroh Poligami Indonesia dan pemahaman serta praktik poligami syar'i.

## **G. Metodologi Penelitian**

Pertanyaan yang kerap kali muncul adalah bagaimana proses dan prosedur yang mesti dilakukan oleh seorang peneliti ketika hendak melakukan penelitian *living Qur'an*. Jika disepakati bahwa fenomena *living Qur'an*



















































Abdullah Saeed adalah intelektual muslim yang belakangan membumi dengan paradigma kontekstualnya ‘konsep hierarki nilai’ dalam rangka memahami ayat-ayat *Eticho-Legal* (Hukum-Moral). Dalam bukunya, *Interpreting the Qur’an Towards A Contemporary Approach*, Abdullah Saeed menawarkan sebuah metodologi interpretasi kontekstual yang dia sebut sebagai *contextual approach*, secara lebih rinci dibandingkan para pengkaji Qur’an kontemporer lainnya. Dalam buku tersebut, Saeed menawarkan sebuah hierarki nilai dalam rangka memahami ayat-ayat *Eticho-Legal* (Hukum-Moral). Di antara hierarki nilai tersebut ada yang namanya *Instructional Values* (nilai-nilai instruksional).

Saeed mengaku bahwa nilai instruksional inilah yang paling sulit dipahami karena jumlah presentasinya dalam Alquran yang sangat banyak dan bentuknya juga sangat beragam. Ayat-ayat yang berisi nilai instruksional ini menggunakan berbagai pilihan kata, seperti *amr* (perintah), *nāhy* (larangan), terkait dengan ‘*amal ṣālih, mathāl* (perumpamaan), kisah atau peristiwa khusus.

Di antara contoh ayat-ayat yang tergolong kategori ini yakni adanya perintah poligami. Pada wilayah inilah para penafsir mengalami kesulitan untuk menghubungkan pesan Alquran tersebut dengan kehidupan modern saat ini. Disebabkan adanya ambiguitas dalam nilai ini, Saeed kemudian merumuskan suatu cara agar bisa mengeksplor dan mengetahui apakah nilai































Poligami *Samara*) yang ada di Jawa Barat. DPI didirikan oleh tiga aktivis yaitu Arif Abu Khalif, Vicky Abu Syamil dan Prasetyo Abu Anger.<sup>3</sup>

Didirikan dengan berbagai motivasi, salah satunya adalah untuk dakwah dan tarbiyah karena menurutnya, sudah banyak yang menjalankan praktik ini namun yang menjadikan ini sebagai sarana edukasi secara khusus itu hampir belum ada sebelumnya. Untuk *event* edukasi secara khusus DPI bisa dikatakan pelopor pelopor. Namun ada juga yang menyelenggarakan *event* seperti ini tetapi itu di komunitas yang sifatnya bukan publik (komunitas yang tertutup) yang tidak terlembaga.<sup>4</sup>

Sebelum DPI berdiri, beberapa aktivis tersebut sebelumnya sudah sering membuat *event-event* seperti ini tetapi sifatnya *kopdar*<sup>5</sup> antar komunitas belum ke publik. Adapun pembahasannya juga tentang masalah tantangan keluarga poligami. Dalam penuturannya, Arif Abu Khalif selaku Direktur DPI menjelaskan bahwa pada tahun 2012 para aktivis DPI, dkk, membangun komunitas dan perkumpulan untuk membuat forum yang sempat viral juga di TV. Kemudian dari situ mulai membentuk komunitas *event-event* kecil. Namun dari yang dilihat dari *event* yang sebelumnya, dianggap belum profesional maka dari situ dari beberapa orang yang diprakarsai oleh ketiga aktivis tersebut berencana membuat *event* yang lebih profesional lebih jelas sehingga orang pun bisa mengenal ta'adud ini dengan lebih baik.

---

<sup>3</sup>Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (28 Mei, 2019).

<sup>4</sup>Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (26 Februari, 2019).

<sup>5</sup>*Kopdar* adalah kepanjangan dari kopi darat. Sebuah istilah yang mengarah kepada ajang pertemuan antar sesama pengguna yang umumnya sudah saling kenal lewat radio, internet, sosial media atau grup chatting. Istilah ini awalnya populer tahun 80-an; <https://id.m.wikipedia.org>. Diakses pada Sabtu, 22 Juni 2019, 15:34.















































terlebih dahulu; dalam arti dia sudah menjalankan seluruh baik kewajiban ataupun sunnah sebagai seorang muslim.

Syarat-syarat poligami yang ditentukan DPI prinsipnya memang yang sering menjadi ukuran adalah tentang kemampuan finansial, keshalihan pribadi dan pemahaman tentang ilmu. Beberapa kasus yang ditangani DPI dalam segi karakter mereka tidak kuat sehingga mereka tidak siap, yang terpenting adalah *leadership* (kepemimpinan) dalam dirinya. Kalau tidak ada itu, biar pun dia punya kemampuan tetapi tidak punya jiwa kepemimpinan (artinya kemampuan pemimpin) maka rumah tangganya tidak bisa nyaman.

DPI membuat ketentuan syarat tentang pemahaman ilmu. Jadi Ilmu sebelum amal dalam arti belajar terlebih dahulu, dengarkan kepada beberapa orang yang sudah berpengalaman, yang sudah punya hubungan bagaimana, kenapa dia gagal, kenapa dia berhasil, apa rahasianya, bagaimana tipsnya, dll. Harus belajar, mencari tahu dahulu dan jangan terburu-buru karena sebenarnya banyak akhwat yang siap dipoligami. “Jadi kesimpulannya menerima ilmu terlebih dahulu, maka dari sinilah kami membangun DPI karena untuk mengedukasi baik para peminat poligami”, jelas Abu Khalif.

Adapun asas (pesan yang terkandung) pernikahan dalam Islam menurut DPI adalah poligami. Mereka berpacu pada beberapa pendapat ulama dan DPI tidak bisa memberi referensi secara detail karena memang bukan *basic*-nya. Namun dari pihaknya, menyarankan agar peneliti mencari pernyataan terkait dalilnya sehingga bisa tahu bahwa pernyataan tersebut ada sumbernya. Jadi monogami adalah solusi terakhir ketika seseorang sadar tidak





































Tinggal mereka (kaum wanita) mau atau tidak untuk belajar, mengendalikan ego dan nafsu mereka terhadap perasaannya. Sehingga terkadang mereka lupa berfikir bahwa solusi untuk berpoligami adalah untuk kebaikan suami dan keutuhan rumah tangganya juga.<sup>11</sup> Hal ini sesuai dengan sesi Ta'aruf *live* yang menjadi program dalam seminar DPI sendiri; menghadirkan dan menawarkan beberapa member/akhwat binaan DPI yang memang siap dita'adud (dimadu) ke peserta seminar yang juga siap untuk berta'adud.<sup>12</sup>

Lalu bagaimana relevansi pandangan DPI dengan para sarjana muslim dalam mempersepsikan poligami. Pada bab sebelumnya telah dibahas bahwa ada tiga persepsi di antara mufassir dan ulama terkait hukum poligami.<sup>13</sup> Dimana pendapat pertama adalah mereka yang melarang adanya praktik pernikahan poligami dengan alasan yang berbeda-beda dan yang tergolong dalam kelompok ini adalah Muhammad Abduh. Selebihnya adalah didominasi oleh para sarjana atau intelektual muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman, Abdullah Saeed dan Amina Wadud. Kemudian yang kedua adalah mereka yang membolehkan poligami setelah memenuhi syarat yang sangat ketat atau menoleransi praktik poligami dalam kondisi darurat. Pendapat yang masuk dalam kelompok ini di antaranya Az-Zamakhshary, Al-Baidawi, Qasim Amin (pengikut Muhammad Abduh), Al-Maraghy dan M. Quraish Shihab. Sedangkan pendapat yang terakhir adalah mereka yang pro atau setuju dengan poligami secara mutlak. Di antara

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 2 April, 2019).

<sup>12</sup>Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 26 Februari, 2019).

<sup>13</sup>Abd. Moqsith, Tafsir atas Poligami dalam Al-Qur'an, *Jurnal Karsa*, Vol. 23 No. 1, Ciputat, Juni 2015, 134.







Menarik untuk dianalisis terkait mekanisme pernikahan poligami DPI dengan Undang-Undang Pernikahan (UUP) di Indonesia ini. Sebab ada beberapa hal yang bertentangan di antara keduanya (DPI dan UUP);

*Pertama*, yang perlu dianalisis adalah terkait alasan dibolehkannya poligami dalam UUP dengan DPI adalah; Jika UUP mengatur diizinkan seorang suami untuk poligami adalah karena ada 3 alasan pokok (Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Istri tidak dapat melahirkan keturunan).<sup>20</sup> Sedangkan, DPI berprinsip bahwa alasan dibolehkannya poligami adalah karena mereka merujuk pada fakta sejarah yang membuktikan bahwa poligami dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan keempat sahabat Nabi. Beberapa argumentasi mengatakan bahwa fitrah laki-laki mampu mencintai beberapa perempuan. Sehingga kalau ternyata dalam konteks hari ini ketika perzinahan merajalela kemudian praktik-praktik prostitusi tersebar luas begitu mudah diakses, maka bisa menjadi alasan kenapa orang laki-laki melakukan perzinahan adalah karena satu saja tidak cukup. Sementara aturan ini dibuat karena Allah yang paling tahu.

*Kedua*, yang perlu dianalisis adalah prosedur kawin lagi (poligami) dalam UUP dengan DPI. UUP mengatur, apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib baginya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jika tidak melakukan ketentuan prosedur dalam

---

<sup>20</sup>Rofiq, *Hukum Perdata...*, 140. Lihat juga di Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57 KHI jo. Ps. 41a PP. Juga menyatakan hal serupa.









Kalau diambil pisau analitisnya dalam penelitian *living Qur'an* ini maka pemahaman dan praktik poligami syar'i DPI dapat diinterpretasikan melalui pendekatan antropologi perspektif hermeneutik (interpretatif) adalah;

*Pertama*, latar belakang berdirinya DPI yang perlu mendapat apresiasi walaupun di samping itu keberadaannya di masyarakat dianggap kontroversial. Akan tetapi jika dilihat dari beberapa faktor yang melatar belakangi berdirinya DPI sebenarnya sangat membantu dan menolong bagi pelaku poligami (suami-istri). Karena faktanya, poligami memang benar-benar dilakukan di masyarakat dan kalau mau membuka mata, kebanyakan dari pelaku poligami tidak banyak yang berhasil (gagal), masih serampangan tanpa ada yang mengarahkan dan lebih parahnya poligami dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istri. DPI mencoba merumuskan point-point, kira-kira materi apa saja yang penting bagi yang membutuhkan orientasi tentang poligami dan poligami yang baik dan sehat itu seperti apa. Dari sini jelas, bahwa beberapa alasan didirikannya DPI, tidak lain dan tidak bukan adalah mengedukasi dan membantu umat Islam dalam menjalankan syariat pernikahan poligami.<sup>32</sup>

*Kedua*, menauladani dari apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya selama masa hidupnya. Ulama sepakat bahwa Nabi SAW semasa hidupnya melakukan poligami. Ada keganjalan bahwa menurut DPI dari keempat sahabat besar Nabi SAW yakni Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali mereka semua adalah pelaku poligami, yang janggal adalah bahwa DPI mengatakan sahabat 'Ali RA berpoligami setelah Fathimah meninggal. DPI

---

<sup>32</sup>Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 18 Desember, 2018).

mengutip dari pendapat ulama namun tidak menyebutkan siapa ulama tersebut.<sup>33</sup> Kemudian setelah ditelusuri ternyata dalam kitab yang ditulis oleh Aṭ-Ṭabary menjelaskan perihal tersebut. Pantas saja jika DPI selalu merujuk pada Aṭ-Ṭabary sebagai asumsi landasannya. Namun sejauh pernyataan dan cerita yang berkembang di masyarakat Indonesia dikatakan bahwa Ali tidak pernah berpoligami. Bahkan justru ‘Ali meninggal terlebih dahulu sebelum Fathimah.

*Ketiga*, terkait sumber rujukan yang menjadi dasar landasan dari praktik poligami syar’i DPI. DPI merujuk kepada beberapa pendapat ulama seperti Aṭ-Ṭabary, Ibn Kathīr dan barisan ulama yang pro terhadap poligami seperti Imad Zaky Al-Barudi. Terkait rujukan yang lainnya, DPI sepenuhnya menyerahkan kepada peneliti agar mencari sumber rujukan siapa saja pendapat yang pro terhadap poligami itu.

DPI tidak mempunyai referensi secara detail karena memang bukan *basic*-nya. Dari pihaknya, menyarankan agar peneliti mencari pernyataan terkait dalilnya sehingga bisa tahu bahwa pernyataan tersebut ada sumbernya. DPI lebih menekankan kepada logika-logika kekinian yang murni dari gagasan serta pengalaman mereka. Karena yang didiskusikan kepada para peserta adalah bagaimana seseorang bisa melakukan syariat poligami ini dengan benar.<sup>34</sup>

Dari sini jelas bahwa referensi yang menjadi tumpuan kekuatan dalil atas hukum poligami masih kurang. Mengingat semua yang terkait tentang dalil beserta tafsirannya dan beberapa referensi kitab tafsir adalah bukan *basic*-nya dan

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 28 Mei, 2019).

<sup>34</sup>Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 2 April, 2019).



ungkinnya seorang laki-laki berbuat adil kepada banyak istri. Dengan demikian, ayat tersebut justru bukan untuk membolehkan poligami melainkan untuk menegaskan ketidakmungkinan berpoligami. Untuk mengokohkan argumennya, maka pendapat ini mengutip ayat lain, yakni surat An-Nisa' ayat 129, dengan kata lain bahwa sebenarnya Alquran ingin mengatakan asas perkawinan Islam adalah monogami.<sup>38</sup>

Pengakuan Saeed dalam teori Hierarki Nilainya, bahwa ayat poligami adalah termasuk dalam nilai instruksional. Ayat yang paling sulit dipahami karena pada wilayah inilah para penafsir mengalami kesulitan untuk menghubungkan pesan Alquran tersebut dengan kehidupan modern saat ini. Disebabkan adanya ambiguitas dalam nilai ini, Saeed kemudian merumuskan suatu cara agar bisa mengeksplor dan mengetahui apakah nilai yang terdapat dalam ayat-ayat seperti di atas berlaku universal atau terbatas pada masa Nabi saja.<sup>39</sup>

Namun DPI menyangkal bahwasannya yang menjadi masalah itu bukan dalilnya, karena dalil itu sudah jelas dan tidak boleh diungkit-ungkit lagi aturannya. Tinggal mau atau tidak mengikuti contoh poligami yang memang sudah ada. DPI mengungkapkan, kalau ternyata dalam konteks hari ini ketika perzinahan merajalela kemudian praktik-praktik prostitusi tersebar luas begitu mudah diakses. Maka tidak mungkin Allah membiarkan sebuah keburukan dan kerusakan terjadi sementara Allah tidak mendatangkan solusi. Artinya, jika kamu punya kebutuhan yang berbeda, punya nafsu yang lebih besar maka syariat

---

<sup>38</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), 175.

<sup>39</sup>Annas Rolli Muchlisin, Penafsiran Kontekstual: Studi atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed, *Jurnal*, Yogyakarta, t.t, 15.

mengaturnya disini. Kenapa orang laki-laki melakukan perzinaan karena satu saja tidak cukup. Sementara aturan ini dibuat karena Allah yang paling tahu.<sup>40</sup> Maka poligami adalah salah satu solusi terbaik syariat Allah yang harus benar-benar ditegakkan. Dbolehkannya poligami adalah jalan yang paling lurus dan paling tepat.

*Kelima*, praktik poligami syar'i DPI. Sesuai dengan pemahaman DPI bahwa poligami adalah salah satu syariat yang berhukum mubah dan bisa saja menjadi sunnah. Dikatakan poligami syar'i sebab pelaku poligami dari awal telah mengaplikasikan syariat Islam. Apakah dia seorang yang menjalankan dan menerapkan aktivitas syariat atau tidak. Jadi memang khusus terkait ketika bicara poligami yang syar'i sesuai syariat Islam adalah ketika berbicara sosok orang yang sudah mempraktikkan syariat Islam itu sendiri. Ketika dia sudah menjalankan syariat Islam maka dia lebih mudah dalam menjalankan praktik poligami itu secara syar'i. Tetapi kalau dia dalam aktivitas sebelumnya bukan orang yang menjalankan syariat secara baik dan benar maka sulit.<sup>41</sup>

Ada beberapa keunikan dan keistimewaan dari konsep poligami syar'i yang digagas DPI. Berbagai macam cara dan pendekatan dalam menjalin hubungan rumah tangga poligami yang syar'i mulai dengan merencanakan dan mempersiapkan pernikahan poligami (pra poligami) dan merawat pernikahan poligami (pasca poligami) dirinci sangat pelik.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 2 April, 2019).

<sup>41</sup>Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 30 April, 2019).

<sup>42</sup>Lihat pada pembahasan sebelumnya (Bab III), point C. tentang Praktik Poligami Syar'i dalam Kehidupan Rumah Tangga Poligami pada halaman 86-91.

Teori aplikatif poligami syar'i itu sendiri juga sarat akan pengalaman para praktisi (pelaku poligami) DPI yang memang sukses dalam keluarga poligaminya itu. Jadi sebenarnya penggunaan istilah 'pemahaman' DPI ini adalah merupakan definisi khusus dari beberapa argumen praktisi DPI yang kemudian dari argumen-argumen mereka dikumpulkan dan dijadikan satu dalam logika berpikir DPI. Jadi agar mempermudah dalam mencerna maka digunakanlah istilah pemahaman DPI.

*Keenam*, teknis prosedur pernikahan poligami dalam DPI dan UUP berbeda. Bahwa DPI sangat memegang peran penting syariat Islam dalam kehidupannya maka secara aturan hukum poligami yang ada di Indonesia tidak bisa bekerja sama karena dianggap bertentangan dengan syariat.<sup>43</sup> Padahal jika tidak melakukan ketentuan prosedur dalam UUP maka dinyatakan melanggar dan akan dikenakan sanksi, seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya; apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana. Masalah ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975.<sup>44</sup>

Lepas dari persoalan tersebut, terdapat sebuah penelitian. Dalam penelitian tersebut, terdapat penjelasan ada beberapa kategori pembaca teks Alquran. Meminjam teori Farid Esack dalam bukunya *The Qur'an: A Short Introduction*, Esack mengkategorisasikan pembaca teks Alquran yang ia sebut sebagai "pecinta" menjadi tiga tingkatan: Pecinta tak kritis (*the uncritical lover*), pecinta ilmiah (*the scholarly lover*) dan pecinta kritis (*the critical lover*). Tiga

---

<sup>43</sup>Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 28 Mei, 2019).

<sup>44</sup>Rofiq, *Hukum Perdata...*, 144. Bisa dilihat terkait bagan prosedur kawin lagi (poligami) pada lampiran skripsi bagian akhir.













menjalankan seluruh kewajiban dan sunnah sebagai seorang muslim. Dalam praktiknya, berbagai macam cara dan pendekatan dalam menjalin hubungan rumah tangga poligami yang syar'i dirinci DPI sangat pelik dalam pembinaannya, mulai dengan merencanakan dan mempersiapkan pernikahan poligami (pra poligami) dan merawat pernikahan poligami (pasca poligami).

Dalam penelitian ini dinyatakan ada keterbatasan penulis seperti yang dipaparkan di awal bahwa terkait narasumber dalam penelitian ini sangat terbatas. Beberapa informan termasuk member dari pihak lembaga ada ketertutupan. Karena begitu sulitnya dalam mengakses informasi terkait pernikahan poligami pada para praktisi maka dalam tahap wawancara ini hanya ada beberapa orang yang sempat berkomunikasi. Selain itu, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengharuskan seorang peneliti terjun langsung ke lapangan. Namun karena lokasi penelitian sangat jauh sehingga ada keterbatasan dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Maka dalam penelitian ini, wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data.

## **B. Saran**

Sebagai sumbangan informasi baru bahwa beberapa tahun belakangan ini di Indonesia muncul sebuah lembaga non formal bagi yang meminati poligami untuk diberikan edukasi bagaimana melaksanakan poligami yang syar'i sesuai syariat Islam. Sehingga hal ini dapat menambah khazanah keilmuan serta dijadikan bahan rujukan atau pertimbangan yang dapat dipergunakan sebagai bentuk dakwah dan tarbiah bagi para pengkaji Alquran













